



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

18 Agustus 2026

Nomor : 100.2.7/2797/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan **REBOAN: Rembuk dan Bincang Bincang Otonomi Daerah Antara Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri**, dengan ini dimohon kehadiran Bupati/Wali Kota untuk hadir secara daring pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai (Untuk Kepala Daerah diharapkan hadir pada pukul 08.30 WIB untuk absensi dan cek suara sebelum acara dimulai)
Agenda : Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri
Tautan Zoom : Meeting ID : 938 9581 4301, Passcode : REBOANOTDA
Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peserta Rapat : 1.Bupati/Wali Kota (tidak diwakilkan), menggunakan format nama (Nama_Jabatan_Daerah)
2.Kementerian/Lembaga, menggunakan format nama (Nama_Jabatan/Asal Instansi)

Adapun substansi yang akan menjadi topik pembahasan antara lain:

1. Evaluasi serta upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kepada Pemerintah Daerah;
2. Inventarisasi dukungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah;
3. Isu dan permasalahan lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Berkenaan dengan substansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 3, dimohon Bupati/Wali Kota menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi M. Fikri Cahyadi (08111022141) atau Enthoni (081110033941).

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Indra Gunawan, SE., MPA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197007151996031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian/Lembaga

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
9. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM;
10. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup;
12. Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif;
13. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional;
14. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
15. Sekretaris Badan Bank Tanah;
16. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

B. Bupati/Wali Kota

1. Bupati Jayapura
2. Bupati Merauke;
3. Bupati Sorong;
4. Bupati Raja Ampat;
5. Bupati Nabire;
6. Bupati Mimika;
7. Bupati Intan Jaya;
8. Bupati Boven Digoel;
9. Bupati Mappi;
10. Bupati Mamberamo Raya;
11. Bupati Waropen;
12. Bupati Supiori;
13. Bupati Biak Numfor;
14. Bupati Sarmi;
15. Bupati Tolikara.



C. Biro Pemerintahan Provinsi

1. Kepala Biro Pemerintahan Aceh;
2. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku;
5. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Utara;
6. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua;
7. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Selatan;
8. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan;
10. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.

D. Asisten Pemerintahan Kabupaten/Kota

1. Asisten Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Asisten Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur;
3. Asisten Pemerintahan Kabupaten Ngawi;
4. Asisten Pemerintahan Kota Pariaman;
5. Asisten Pemerintahan Kota Ternate;
6. Asisten Pemerintahan Kota Tual.

E. Lingkup Kementerian Dalam Negeri

1. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah;
3. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
4. Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
5. Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
7. Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
9. Direktur Produk Hukum Daerah;
10. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

